

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengangguran

a. Definisi Pengangguran

Pengangguran merupakan hal yang akan selalu muncul di dalam perekonomian, dimana saat pengeluaran agregatnya lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan faktor-faktor produksi yang telah tersedia di dalam perekonomian untuk dapat menghasilkan barang-barang dan juga jasa (Prasaja, 2013).

Navarrete menjelaskan dalam bukunya “Underemployment in Underdeveloped Countries“ pengangguran dapat di lukiskan sebagai suatu keadaan dimana adanya pengalihan sejumlah faktor tenaga kerja ke bidang lain yang mana tidak akan mengurangi output keseluruhan sektor asalnya. Atau dapat dikatakan bahwa produktivitas marginal unit-unit faktor tenaga kerja tempat asal mereka bekerja adalah nol atau hampir mendekati nol atau juga negatif (Jhingan, 2014:22).

Salah satu alasan pengangguran selalu muncul didalam perekonomian adalah pencarian kerja. Pencarian kerja (job search) adalah suatu proses seseorang untuk mencocokkan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan juga keterampilan sesuai yang dimiliki oleh mereka. Namun, jika semua pekerja dan pekerjaan tidak ada bedanya, maka tidak menutup kemungkinan bagi para pekerja

bahwa mereka cocok dengan pekerjaan apa saja, akan tetapi pada kenyataannya bakat dan juga kemampuan seseorang itu berbeda-beda (Mankiw dkk, 2013).

Berikut pengertian pengangguran menurut International Labour Organization (ILO) adalah:

- 1) Pengangguran terbuka merupakan seseorang yang telah masuk kedalam penduduk usia kerja yang setelah beberapa lama tidak bekerja, kemudian bersedia menerima pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan.
- 2) Setengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai pekerja mandiri atau pekerja yang sedang berusaha mencari pekerjaan selama periode tertentu karena terpaksa melakukan pekerjaannya yang kurang dari jam kerja pada umumnya atau yang masih mencari pekerjaan lain ataupun yang masih bersedia mencari tambahan pekerjaan (Nathalya, 2012).

b. Jenis- jenis Pengangguran

1. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional terjadi karena berpindahnya para pekerja dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya dan juga karena siklus hidup yang berbeda. Pengangguran jenis ini akan selalu terjadi meskipun perekonomian dalam kondisi baik. Hal ini terjadi karena tenaga kerja baru yang masuk ke dunia kerja maupun tenaga kerja yang berpindah pekerjaan ingin mencari dan mendapatkan upah yang lebih baik.

2. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal terjadi karena terjadinya naik turunnya siklus ekonomi yang mengakibatkan permintaan tenaga kerja menjadi berkurang dibandingkan dengan penawaran kerjanya.

3. Pengangguran Struktural

Pengangguran sruktural terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara struktur berdasarkan jenis ketrampilan, pekerjaan, industri serta lokasi geografis dengan struktur permintaan tenaga kerja (Harjanto, 2014).

Terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk mengetahui besar dan juga kecilnya tingkat pengangguran, antara lain:

a. Pendekatan Angkatan Kerja (Labor force approach)

Dimana besar kecilnya tingkat pengangguran dihitung sesuai dari presentase perbandingan antara jumlah orang yang menganggur dan juga jumlah angkatan kerja.

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Yang Menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

b. Pendekatan Pemanfaatan Tenaga Kerja (Labor utilization approach)

Pendekatan ini dugunakan sebagai penentu besar kecilnya tingkat pengangguran yang sesuai dengan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja, yaitu:

a) Pengangguran Penuh (Unemployment)

Yaitu orang yang benar-benar tidak bekerja sama sekali atau tidak memanfaatkan waktunya untuk bekerja sama sekali. Pengangguran ini juga sering disebut juga sebagai *open unemployment*.

b) Setengah Menganggur (Underemployed)

Yaitu mereka yang telah bekerja, tapi tidak dimanfaatkan secara penuh, artinya dalam satu minggu jam kerja mereka kurang dari 35 jam. Tipe pengangguran seperti ini relative besar, biasanya pengangguran seperti ini sering disebut juga dengan *disguised unemployment*(Ibrahim, 2014).

c. Dampak Pengangguran

Menurut Nanga dan Muana dalam Zarkasi (2014), menyebutkan adanya dampak dari pengangguran, diantaranya:

1. Dampak pengangguran terhadap suatu perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi menyebabkan sulitnya masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut, dimana dapat dilihat dengan jelas akibat buruk dari masalah pengangguran yang timbul karena ekonomi, yaitu :

- a) pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan. Hal itu terjadi karena pendapatan nasional yang sebenarnya (actual output) yang dicapai lebih rendah dari pendapatan nasional potensial (potencial output), yang menyebabkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai lebih rendah dari tingkat yang dicapainya.

- b) Pengangguran mengakibatkan pendapatan pemerintah (*tax revenue*) menjadi berkurang. Hal tersebut terjadi karena tingkat ekonomi yang rendah, sehingga menyebabkan pendapatan yang diperoleh pemerintah menjadi sedikit.
- c) Pengangguran dapat menimbulkan dua akibat buruk pada sektor swasta. Pertama, dimana pengangguran dari tenaga kerja diakibatkan oleh adanya lebihnya kapasitas mesin-mesin yang disediakan disuatu perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan karena lesunya kegiatan yang dialami oleh suatu perusahaan sehingga menyebabkan keuntungan perusahaan menjadi berkurang. Karena, jika keuntungan suatu perusahaan rendah menyebabkan menjadi berkurangnya perusahaan lain untuk melakukan investasi.

2. Dampak Pengangguran terhadap individu dan masyarakat

Selain membawa akibat buruk terhadap perekonomian, pengangguran juga membawa dampak buruk terhadap individu dan masyarakat, antara lain:

- a) Pengangguran menyebabkan seseorang menjadi kehilangan mata pencaharian dan juga pendapatannya. Dapat kita ketahui bahwa dinegara-negara yang sudah maju pengangguran disana mendapatkan atau memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah berupa asuransi pengangguran, karena itulah para pengangguran dinegara yang sudah maju masih dapat membiayai kehidupannya dan juga keluarganya dan dengan begitu mereka tidak harus bergantung kepada orang lain.

b) Pengangguran dapat mengakibatkan seseorang kehilangan keterampilannya. Dimana keterampilan seseorang dapat bertahan jika seseorang tersebut biasa mempraktekkan keterampilannya. Hal itulah yang menyebabkan pengangguran dalam kurun waktu yang lama dapat menyebabkan tingkat keterampilan menjadi turun sehingga tidak lagi bisa melakukan keterampilan yang sebelumnya telah seringdi praktek kan.

c) Pengangguran dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan politik. Jika kegiatan ekonomi suatu perusahaan sedang lesu dan pengangguran tinggi maka hal itu dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa. Hal tersebut mengakibatkan golongan yang berkuasa dipandang jelek oleh masyarakat, dengan melontarkan kritikan dan juga tuntutan kepada pemerintah dan disertai dengan demonstrasi atau unjuk rasa (Sukirno, 2002).

3. Berikut beberapa tujuan Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Pengangguran, antara lain:

a) Menyediakan Lowongan Pekerjaan

Dengan hal ini pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah pengangguran, hal ini meliputi usaha jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk jangka panjangnya, dimana pemerintah berusaha mengatasi pengangguran karena jumlah penduduk yang selalu bertambah sehingga menyebabkan terus meningkatnya tenaga kerja. Untuk menghindari

masalah pengangguran yang semakin serius, pemerintah giat melakukan atau menyediakan lowongan pekerjaan yang cukup dari tahun ke tahunnya.

b) Meningkatkan Taraf Kemakmuran Masyarakat

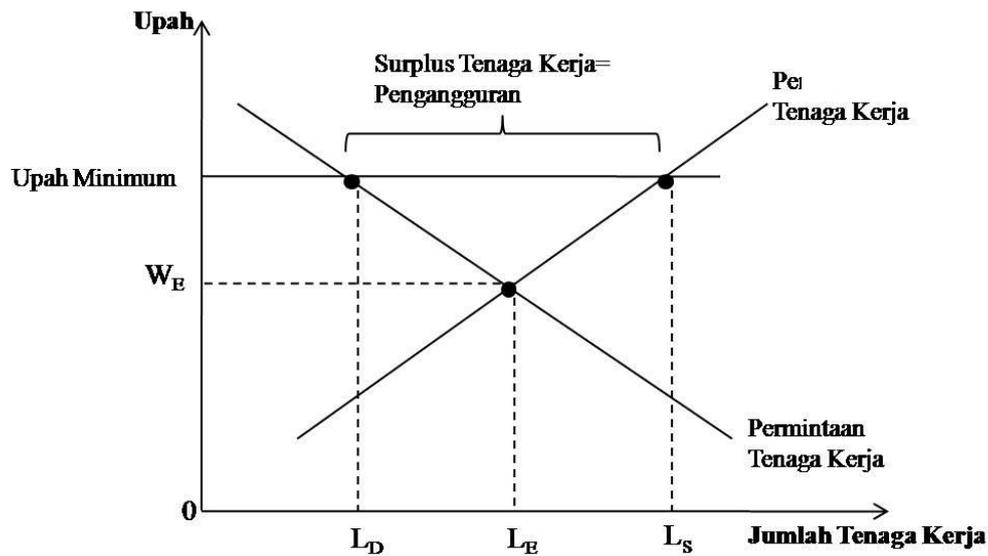
Kenaikan kesempatan kerja dapat menambah produksi nasional dan juga pendapatan nasional, sehingga dengan perkembangan ini diharapkan dapat menambah tingkat kemakmuran masyarakat. Ukuran kasar dari kemakmuran masyarakat ialah dimana pendapatan perkapita yang diperoleh dengan membagikan pendapatan nasional dengan jumlah penduduk.

c) Tujuan Bersifat Sosial dan Politik

Tujuan tersebut tidak kalah penting dengan tujuan yang bersifat ekonomi, dimana dalam mengatasi masalah pengangguran pemerintah mulai melakukan kebijakannya serta berusaha untuk mencapai beberapa tujuan yang bersifat sosial dan politik. Tanpa adanya kestabilan sosial dan juga politik, maka usaha yang dilakukan untuk menangani masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah.

d) Mewujudkan Kestabilan Politik

Tanpa adanya kestabilan politik, maka tidak mungkin bagi suatu negara untuk dapat mencapai pertumbuhan yang cepat secara terus menerus. Hal itulah yang menyebabkan mengapa pertumbuhan ekonomi dan kestabilan ekonomi sangat dibutuhkan untuk dapat menaikkan taraf kemakmuran masyarakat yang mana dapat diwujudkan dengan memerlukan kestabilan politik (Sukirno dalam Zarkasi, 2014)



Sumber : Gregory Mankiw, 2012

Gambar 2.1

Kurva Pengangguran Akibat Upah di Atas Titik Keseimbangan

Berdasarkan kurva di atas dijelaskan bahwa di pasar tenaga kerja, W_E adalah upah pada titik keseimbangan penawaran dan permintaan. Pada upah keseimbangan ini, jumlah penawaran dan permintaan tenaga kerja adalah L_E . Sebaliknya, jika upah tersebut dipaksa agar tetap berada di atas titik keseimbangannya, mungkin karena adanya peraturan upah minimum, maka jumlah penawaran tenaga kerja meningkat menjadi L_S , dan jumlah permintaan tenaga kerja menurun menjadi L_D . Surplus tenaga kerja yang dihasilkan, $L_S - L_D$, adalah pengangguran. Meskipun ditampilkan untuk memperlihatkan pengaruh dari upah minimum, pada kurva di atas juga menggambarkan poin yang mana bersifat lebih umum: jika upah dipertahankan di atas titik keseimbangan karena segala alasan, maka hasilnya adalah pengangguran (Mankiw dkk, 2013:122).

Menurut Sukirno dalam (Cholili, 2014), menyatakan bahwa dampak buruk dari pengangguran adalah pendapatan masyarakat menjadi berkurang atau bahkan tidak dapat memperoleh pendapatan sama sekali, hal ini menyebabkan tingkat kemakmuran masyarakat berkurang. Pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan juga sosial, sehingga masyarakat harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur, maka akan meningkat juga tingkat kemiskinan karena adanya pengangguran.

2. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan suatu variabel makro ekonomi yang mengindikasikan dinamika dalam perekonomian secara menyeluruh. Peristiwa inflasi menyebabkan terjadinya perubahan dan pertumbuhan dalam perekonomian baik secara mikro maupun makro dimana hal itu berpengaruh terhadap kinerja ekonomi lainnya. Inflasi juga dapat diartikan dengan naiknya harga barang secara umum dan juga secara terus menerus, artinya kenaikan harga barang terjadi hampir sebagian besar barang-barang di pasar dan terjadi dalam kurun waktu lama. Dengan demikian, jika kenaikan harga hanya terjadi pada satu atau beberapa jenis barang saja dalam kurun waktu yang singkat, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai inflasi (Yuliadi, 2013).

Badan Pusat dan Statistik Indonesia menjelaskan, yang dimaksud dengan inflasi adalah kecenderungan naiknya harga dan barang yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa yang ada di

dalam negeri pun juga akan ikutmeningkat, dimana naiknya harga barang dan jasa tersebut dapat menyebabkan menjadi menurunnya nilai mata uang. Oleh karena itu, inflasi juga sering diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

b. Jenis-Jenis Inflasi

Menurut Samuelson dan Nordhaus dalam Pramesthi (2013), menjelaskan bahwa inflasi dapat dilihat dari tingkat derajat atau kejadian parahnya menjadi tiga jenis yaitu :

a) Inflasi Moderat (*Moderat Inflation*)

Suatu kejadian yang terjadi diawali dengan naiknya harga secara lambat dan juga dapat diprediksi. Dapat juga kita sebut sebagai laju inflasi per satu tahun, karena jika harga barang-barang relatif stabil maka masyarakat akan cenderung percaya pada uang.

b) Inflasi Ganas (*Gallopig Inflation*)

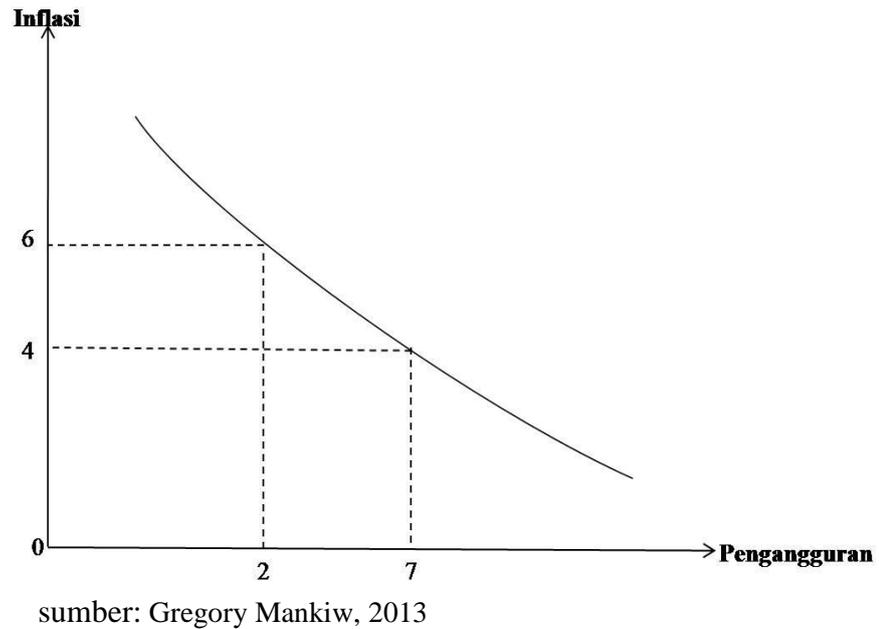
Yaitu inflasi yang ditandai dengan adanya dua atau tiga digit seperti 20, 100 dan 200 per tahunnya. Jika inflasi yang seperti ini muncul, maka akan timbul juga suatu gangguan yang cukup serius terhadap perekonomian.

c) Hiperinflasi

Yaitu suatu keadaan dimana harga barang dan jasa menjadi naik begitu cepat dan nilai uang menjadi menurun drastis. Hiperinflasi ini terjadi jika tingkat inflasi berada lebih dari 50% dalam satu bulannya.

Peristiwa inflasi yang terjadi pada suatu perekonomian merupakan suatu kombinasi dari pada aspek keseimbangan pasar barang, pasar uang, dan pasar tenaga kerja. Inflasi yang ditimbulkan pada pasar barang disebabkan oleh adanya distorsi terhadap arus produksi dan juga distribusi barang dari sektor produksi ke pasar dan menimbulkan naiknya biaya produksi yang memicu naiknya harga inflasi. Dampak yang ditimbulkan oleh inflasi yang mana ditimbulkan dari dorongan biaya produksi terhadap perekonomian disamping kenaikan harga juga mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan nasional (Yuliadi, 2013).

Sadono Sukirno menjelaskan bahwa tingkat inflasi memiliki hubungan yang positif maupun negatif terhadap tingkat pengangguran. Jika tingkat inflasi yang dihitung merupakan inflasi yang terjadi pada suatu harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi berakibat adanya peningkatan pada tingkat pinjaman (bunga). Dengan demikian, adanya tingkat bunga yang tinggi maka mengurangi investasi untuk dapat mengembangkan sektor-sektor yang lebih produktif, hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran menjadi tinggi disebabkan oleh rendahnya kesempatan kerja akibat dari rendahnya investasi.



Gambar 2.2
Kurva Phillip

Kurva Phillips menggambarkan adanya suatu hubungan yang dialami antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran yang didasari oleh asumsi, dimana inflasi merupakan cerminan dari kenaikan permintaan agregat. Oleh karena itu, dengan meningkatnya permintaan agregat maka permintaan agregat berdasarkan teori permintaan, permintaan juga ikut naik, kemudian harga akan menjadi naik. Dengan naiknya harga (inflasi) maka untuk dapat memenuhi permintaan tersebut produsen harus meningkatkan produksinya dengan mulai memperbanyak tenaga kerjanya yang mana tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output, dengan adanya peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) pengangguran akan berkurang (Alghofari, 2010).

Hasil temuan dari A.W Phillips selanjutnya dikembangkan oleh Paul Samuelson dan Robert Solow dengan melakukan sedikit modifikasi, penelitian ini dilakukan di Amerika Serikat. Kemudian ditemukan hasil dari penemuan Paul Samuelson dan Robert Solow, ditemukan bukti adanya hubungan yang negatif antara laju pertumbuhan inflasi dan laju pertumbuhan pengangguran (Pratikto dan Rachmawati, 2013).

3. Jumlah Penduduk

a. Definisi Jumlah Penduduk

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2016) menjelaskan bahwa “penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap”. Berdasarkan Undang-undang Pasal 28 Nomor 33 Tahun 2004, jumlah penduduk menjadi variabel utama untuk menentukan kebutuhan pendanaan suatu daerah untuk dapat melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Dimana perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar akan memerlukan atau membutuhkan anggaran yang semakin besar pula, agar kualitas pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik, maka pertumbuhan penduduk harus dikendalikan (Nurdhian, 2013).

Sudah sejak lama masalah kependudukan menjadi perhatian bagi manusia. Banyak para ahli yang membicarakan tentang besarnya jumlah penduduk yang seimbang sesuai dengan pertimbangan politik, sosial, serta ekonomi. Sebelum memasuki abad ke-17, masalah kependudukan didasari oleh pandangan

bagaimana pentingnya agar jumlah penduduk tetap dipertahankan, jika mungkin justru ditingkatkan. Namun ketika memasuki abad ke-17 ketika penduduk dunia mulai pesat, ditambah dengan terjadinya ledakan jumlah penduduk pada abad ke-18 dimana banyak terdapat pandangan yang menentang adanya peningkatan jumlah penduduk (Samadi, 2006).

b. Teori Kependudukan Oleh Beberapa Ahli

1. Teori Kependudukan menurut Thomas Robert Malthus

Menurut Malthus dalam bukunya yang berjudul *principle of population* mengatakan bahwa perkembangan manusia lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Maka Malthus meramalkan bahwa suatu saat akan terjadi malapetaka (disaster) yang akan menimpa manusia, hal tersebut akan timbul karena adanya tekanan dari pertumbuhan penduduk tersebut, dimana lahan menjadi semakin berkurang karena aktivitas pembangunan yang semakin berkembang dan mengakibatkan bahaya pangan bagi manusia (Deliarnov dalam Mustopa, 2011).

Disamping itu Malthus juga berpendapat bahwa untuk hidup manusia membutuhkan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk dapat keluar dari masalah kekurangan pangan, maka pertumbuhan penduduk harus dibatasi. Menurut Malthus pembatasan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *Preventive Checks* (Pengurangan penduduk dengan kelahiran)

dan *Positive Checks* (Pengurangan penduduk melalui proses kematian). Jika di suatu wilayah dengan jumlah penduduk yang melebihi jumlah persediaan bahan pangan, maka tingkat kematian juga menjadi meningkat dan mengakibatkan terjadinya kelaparan dan sebagainya. Proses ini akan terus berlangsung hingga jumlah penduduk seimbang dengan persediaan bahan pangan.

Dalam teorinya Malthus juga berpendapat bahwa :

- a. Manusia akan tetap miskin adanya kecenderungan pertumbuhan penduduk berjalan lebih cepat dari pada persediaan makanan.
- b. Pertumbuhan penduduk dapat diibaratkan sebagai deret ukur atau deret kali sehingga perlipat-gandaan jumlah penduduk dalam setiap 25 tahun, sedangkan peningkatan sarana-sarana kehidupan berjalan lebih lambat menurut deret ukur ataupun deret hitung.
- c. Melalui tindakan pantang seksual/pantangan kawin, perang, bahaya kelaparan, dan bencana alam, jumlah penduduk setiap kali memang diusahakan sesuai dengan sarana kehidupan yang telah tersedia. Tetapi cara itu masih belum cukup untuk dapat meningkatkan kehidupan masyarakat sampai di atas batas minimum (Fatihin 2016).

2. Aliran Marxist

Aliran ini dipelopori oleh Karl Max dan Federich Eangels, menurut Karl tekanan penduduk yang terjadi pada suatu negara bukan merupakan suatu tekanan penduduk terhadap kesempatan kerja. Kemelaratan tidak terjadi

karena adanya pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, namun disebabkan oleh adanya struktur masyarakat itu sendiri.

3. Teori Kependudukan Mutakhir

Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah dilakukan formulasi ulang (reformulation) terhadap teori kependudukan, terutama untuk teori Malthus dan juga Karl Max yang mana merupakan rintisan dari teori kependudukan mutakhir. Dimana teori kependudukan mutakhir ini menekankan hanya pada kondisi sosial, ekonomi, dan juga teknologi. Teori kependudukan mutakhir ini dipelopori oleh Jhon Stuard Mill, Arsene Dumont, dan Michele Thmas Sadler.

Data kependudukan dikelompokkan berdasarkan karakteristik atau komposisi penduduk, misalnya komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan.

Berdasarkan pengelompokan tersebut diatas, struktur penduduk dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu :

- a. Umur 0-14 tahun yang dinamakan sebagai usia muda (usia belum produktif). Jika pada suatu wilayah atau negara sebagian besar penduduknya berusia muda, wilayah atau negaranya termasuk dalam struktur penduduk muda.
- b. Umur 15-64 tahun dinamakan usia dewasa (usia produktif atau usia kerja). Jika pada suatu wilayah atau negara sebagian besar penduduknya berusia dewasa, maka wilayah atau negaranya termasuk dalam struktur penduduk dewasa.

- c. Umur $65 >$ dinamakan sebagai usia tua (usia tidak produktif). Jika pada suatu wilayah atau negara sebagian besar penduduknya berusia tua, maka wilayah atau negaranya termasuk dalam struktur penduduk tua (Sholekah, 2016).

4. Sedangkan menurut teori David Ricardo dalam buku Ekonomi Pembangunan, Hudyanto (2014) :

“Sebagaimana ciri dari madzab klasik, Ricardo memusatkan perhatian pada peranan manusia dalam pertumbuhan ekonomi, atau dengan kata lain output nasional (GDP) ditentukan semata-mata oleh jumlah penduduk (sebagai tenaga kerja). Apabila jumlah penduduk meningkat pesat, maka output juga akan meningkat. Sebaliknya, jika jumlah penduduk menurun maka output juga menurun. Demikian juga jika jumlah penduduk konstan tingkat output juga akan konstan, karena tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP) ditentukan oleh jumlah penduduk, perhatian tentu dipusatkan pada jumlah penduduk”.

Oleh karena itu David Ricardo mengasumsikan bahwa dalam jangka panjang jumlah penduduk akan konstan, karena output tergantung pada jumlah penduduk maka diperkirakan dalam jangka panjang output nasional akan menjadi cenderung tumbuh konstan sehingga pendapatan per kapita akan konstan.

5. Teori John Stuart Mill

John Stuart Mill adalah seorang ahli filsafat dan juga ahli ekonomi yang berkebangsaan Inggris, ia setuju dengan pendapat dari Malthus tentang laju pertumbuhan penduduk yang melebihi laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma. Tetapi demikian ia juga berpendapat bahwa pada saat

tertentu manusia juga berpengaruh terhadap perilaku demografinya. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa jika produktivitas seseorang tinggi maka cenderung ingin memiliki keluarga kecil. Keadaan yang seperti ini menyebabkan fertilitas menjadi rendah. Menjadi suatu kesalahan jika kemiskinan tidak dapat dihindari atau apabila kemiskinan terjadi dikarenakan suatu sistem kapitalis. Apabila suatu waktu di suatu wilayah mengalami kekurangan pada bahan makanan, maka hal tersebut bersifat sementara.

Tinggi rendahnya suatu tingkat kelahiran ditentukan oleh manusia itu sendiri. Menurut John Stuart Mill, menyarankan untuk meningkatkan tingkat pendidikan bagi golongan yang tidak mampu. Dengan meningkatnya pendidikan yang ada di masyarakat, mereka akan secara rasional memperhitungkan perlu tidaknya untuk menambah jumlah anak yang sesuai dengan usaha dan karirnya. Mill juga berpendapat bahwa umumnya perempuan tidak menghendaki untuk memiliki anak yang banyak, dan apabila kehendak mereka diperhatikan maka tingkat kelahiran akan menjadi rendah (Fatihin, 2016).

4. Tingkat Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Menurut Suryawati dalam Cholili (2014), Kemiskinan bukan berarti hidup dalam suatu kekurangan uang dan juga pendapatannya yang rendah, tetapi dikarenakan oleh hal lain, misalnya karena tingkat pendidikan dan kesehatannya yang rendah, perlakuan yang tidak adil dalam hukum,

kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.

b. Jenis-Jenis Kemiskinan

a) Kemiskinan absolute

Suatu keadaan dimana pendapatan yang diperoleh seseorang berada di bawah garis kemiskinan atau keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan serta kesehatan yang mereka butuhkan untuk dapat melangsungkan hidup dan juga bekerja.

b) Kemiskinan struktural

Suatu keadaan yang terjadi karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam sistem sosial, politik dan budaya yang mana tidak mendukung adanya pemberantasan kemiskinan, namun malah sering menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan.

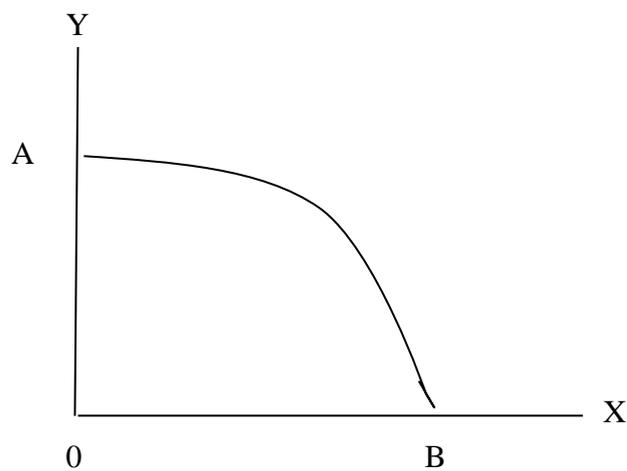
c) Kemiskinan relatif

Suatu kondisi yang diakibatkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau semua lapisan pada masyarakat sehingga mengakibatkan adanya ketimpangan pada pendapatan.

d) Kemiskinan kultural

Suatu persoalan yang terjadi karena persoalan terhadap sikap seseorang atau masyarakat yang dikarenakan oleh faktor budaya, seperti tidak ingin berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupannya, misal sikap malasnya, boros, dan juga tidak ingin mengembangkan bakat kreatifitasnya meskipun ada bantuan dari pihak luar. Dengan terus meningkatnya permasalahan mengenai

kemiskinan dan juga ketidakmerataan memberikan alasan untuk dapat menganalisis permasalahan tersebut. Todaro (1995), menjelaskan bahwa pendekatan sederhana dalam masalah distribusi pendapatan serta kemiskinan adalah dengan menggunakan kurva kemungkinan produksi (*Production Possibility Framework*).



Sumber : Prapti, 2006.

Gambar 2.3
Kurva Kemungkinan Produksi

Dapat dijelaskan dari kurva kemungkinan produksi diatas, dimana jumlah produksi dari barang mewah ditunjukkan oleh garis vertikal sedangkan jumlah produksi dari barang kebutuhan pokoknya ditunjukkan oleh garis horizontal. Kurva kemungkinan produksi dijelaskan sebagai titik kombinasi antara kedua barang yang diproduksi secara maksimum. Dijelaskan bahwa titik A dan B menggambarkan adanya perpaduan dari produksi barang mewah dengan barang kebutuhan pokok dimana memiliki pendapatan yang sama besarnya. Akan tetapi

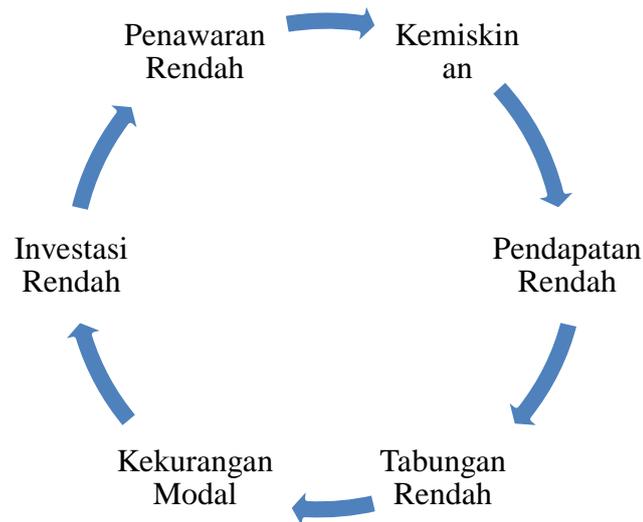
titik A lebih banyak memproduksi barang mewah dari pada dengan produksi kebutuhan pokok. Kebalikannya, dimana titik B lebih sedikit dalam memproduksi barang mewah yang dihasilkan untuk masyarakat dibandingkan dalam memproduksi barang untuk kebutuhan pokok (Prapti, 2006).

c. Lingkaran Setan Kemiskinan

Lingkaran setan merupakan jalinan yang tidak memiliki ujung pada pangkal, tidak ada kejelasan dimanan sebab dan juga akibatnya, seperti persoalan mana yang lebih dahulu: telur atau ayam. Nurkse menjelaskan bahwa lingkaran setan dikatakan sebagai berikut:

“Lingkaran setan itu mengandung makna deretan yang melingkar dengan kekuatan-kekuatan dimana satu sama lain saling beraksi, bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan negara miskin atau penduduk miskin tetap berada dalam keadaan yang melarat.”

Dapat dilihat dari sisi permintaan, lingkaran setan dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Hudiyanto, 2014.

Gambar 2.4
Lingkaran Setan Kemiskinan

Dari gambar diatas maka dapat dijelaskan bahwa, kemiskinan (*poverty*) menyebabkan rendahnya pendapatan, rendahnya pendapatan menyebabkan tabungan menjadi rendah; rendahnya tabungan menyebabkan kekurangan modal, kekurangan modal menyebabkan investasi menjadi rendah; investasi rendah menyebabkan penawaran (*supply*) menjadi rendah, penawaran (*supply*) menyebabkan kemiskinan (*poverty*). Dengan kata lain, bahwa kemiskinan menyebabkan miskin (Hudiyanto, 2014).

Untuk dapat mengetahui seberapa tinggi suatu kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Melalui pendekatan ini, kemiskinan dilihat sebagai tidak mempunya seseorang dari sisi ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar makanan, untuk yang bukan makanan diukurnya melalui tingkat pengeluarannya. Maka,

dapat disimpulkan bahwa penduduk miskin adalah suatu keadaan dimana pengeluaran perkapita perbulannya dibawah garis kemiskinan (Cholili, 2014).

Terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi terjadinya masalah kemiskinan, antara lain :

a) Kriteria Bank Dunia

Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia adalah sebesar USD 2 per kapita/hari. Untuk ukuran rumah tangga dengan pendapatan per kapita/hari yang kurang dari tetapan tersebut, maka dapat digolongkan kedalam kategori miskin.

b) Kriteria Asian Development Bank

Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh *Asian Development Bank* adalah sebesar USD 1,25 per kapita/hari. Sedangkan untuk ukuran rumah tangga dengan pendapatan per kapita/hari yang mana kurang dari tetapan tersebut maka digolongkan dalam kategori miskin.

c) Kriteria BPS

Garis kemiskinan yang dipakai oleh BPS adalah nominal yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah yaitu Rp. 317.348 /kapita/bulan. Sedangkan untuk ukuran rumah tangga dengan pendapatan per kapita/bulan kurang dari tetapan tersebut maka digolongkan ke dalam kategori miskin (Sugiyarto dkk. 2015).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2014), yang mengkaji tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah tahun 1991- 2011”, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang penting untuk menilai kinerja suatu perekonomian terutama untuk menganalisis hasil pembangunan ekonomi yang sudah dilaksanakan oleh suatu negara maupun daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi negara atau wilayah tersebut berkembang dengan sangat baik. Sebaliknya, jika suatu perekonomian yang ada di suatu negara atau wilayah tidak dapat berkembang dengan baik, maka hal buruk yang akan terjadi adalah masalah pengangguran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan penduduk (PP), upah minimum (UM), inflasi (INF) dan investasi (INV) terhadap tingkat pengangguran di Jawa Tengah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode estimasi OLS (*Ordinary Least Square*), data yang digunakan dalam metode ini menggunakan data sekunder dengan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya kecuali pertumbuhan penduduk.

Sedangkan menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Wulandari (2015), mengenai “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran dan Pendidikan terhadap Kemiskinan Provinsi di Indonesia tahun 2008-2012”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui berbagai faktor yang dapat

mempengaruhi tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan juga pendidikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel yang meliputi data *cross section* sebanyak 33 provinsi dan *time series* selama 5 tahun, model yang digunakan yaitu *random effect model*. Berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa pada saat pengangguran turun maka kemiskinan akan turun dan sebaliknya, sedangkan variabel pendidikan tidak dapat mempengaruhi kemiskinan karena ketidaksiapan lulusan SMA untuk bersaing dalam dunia kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Cholili dan Hardjo (2016), tentang “Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin”. Pengangguran merupakan suatu permasalahan yang mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan, yang harus lebih diperhatikan lagi ialah dari segi kesehatan serta pendidikan yang mana sebagai peranan penting bagi proses pembangunan, kesehatan sebagai komponen untuk pembentukan, serta IPM sebagai indikator ekonomi untuk mengevaluasi masalah kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tiga variabel independen berpengaruh terhadap kemiskinan yang ada di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *Ordinary Least Square* (OLS), yang mana digunakan untuk dapat melihat bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh secara simultan dari ketiga

variabel independen dengan koefisien determinannya 0,743 (R-Square). Namun saat diuji secara parsial PDRB tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan IPM dan pengangguran berpengaruh signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro (2014), yang berjudul tentang “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2009 – 2011”. Keberhasilan pembangunan di Jawa Timur pada tahun 2011 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur adalah sebesar 7,22 % jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 6,50%. Serta tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Timur pada tahun 2011 sebesar 4,14 % juga dibawah TPT nasional yang hanya sebesar 6,80%. Akan tetapi dibalik keberhasilan yang diraih oleh Provinsi Jawa Timur ternyata masih menyisakan suatu permasalahan ekonomi yang mana mencemaskan yaitu mengenai masalah tingkat kemiskinan yang tinggi diikuti dengan rendahnya tingkat pendidikan. Tingkat kemiskinan Jawa Timur hanya sebesar 14,23 % dimana lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional Jawa Timur yang sebesar 12,49 %, serta tingkat pendidikan 88,79 %, dimana itu lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan nasional sebesar 92,99 %.

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data panel dengan data *time series* dari tahun 2009-2011 dan *cross section* 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Terdapat tiga pendekatan yang digunakan yaitu *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Dari ketiga model tersebut dipilih model yang terbaik dengan menggunakan uji chow

untuk memilih FEM atau PLS yang lebih baik. Lalu hasil uji chow tersebut diuji kembali menggunakan uji Hausman untuk memilih FEM atau REM yang lebih baik. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM). Dari hasil analisis terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi cukup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur, dengan nilai koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar -0,871315. Tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur dengan nilai koefisien tingkat penganggurannya sebesar -0,165560, hal ini bertentangan dengan teori ekonomi bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Dan pendidikan yang diproksi dengan angka melek huruf (AMH) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur dengan nilai koefisien AMH sebesar -0,687686.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramesthi (2013), mengenai “Pengaruh Pengangguran dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Trenggalek”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengangguran dan juga inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2002-2009. Untuk mengetahui hipotesis penelitian, maka digunakan model ekonometrika dengan metode OLS (*Ordinari Least Square*), yang mana diestimasi dengan menggunakan program *Eviews 7*. Maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian bahwa variabel pengangguran dan juga inflasi berdasarkan hasil uji bersama-sama, semua variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Trenggalek dimana taraf signifikansinya 5% dengan probabilitas

0,005515. Sedangkan secara individu, variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2002-2011 dengan koefisien 0,194404646804.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel tingkat kemiskinan sebagai salah satu variabel dependennya dimana belum ada ditemukan dalam penelitian sebelumnya, pada penelitian ini didapatkan bahwa variabel kemiskinan menunjukkan hasil yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada derajat kepercayaan sebesar 1%. Koefisien variabel tingkat kemiskinannya sebesar 2.374977 yang berarti bahwa apabila tingkat kemiskinan naik 1% maka tingkat pengangguran pun juga akan menjadi naik atau meningkat sebesar 2.374977%. Perbedaan berikutnya juga terletak pada daerah dan tahun pengambilan variabel penelitian.

C. Hipotesis

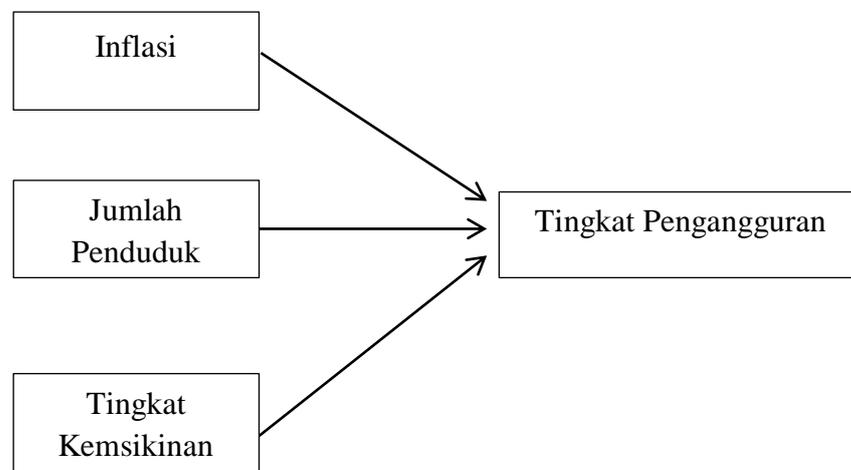
Hipotesis merupakan dugaan yang diambil untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya harus diuji secara empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga variabel Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah.
2. Diduga variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah.

3. Diduga variabel Tingkat Kemiskinan berpengaruh secara positif signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah.

D. Model Penelitian

Agar dapat lebih memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini gambar dari kerangka pemikiran yang skematis.



Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran